

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Tampan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Kecamatan Tampan mendapati jawaban Kurang Baik sebanyak 37 orang atau 37,20% dari 99 responden. Hasil wawancara penulis dengan sampel mengatakan sosialisasi mengenai kebijakan retribusi persampahan/ kebersihan sudah pernah dilaksanakan, tetapi belum memiliki jadwal yang rutin dan hanya bersifat melalui perantara bukan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
2. Sumber daya yang tersedia dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Kota Pekanbaru mendapati jawaban Kurang Baik sebanyak 32 orang responden atau 32,07% dari 99 responden. Hasil wawancara penulis dengan sampel mengatakan sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan sudah memadai, akan tetapi sumber daya finansial masih belum memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Keadaan disposisi pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Kecamatan Tampan mendapati jawaban Kurang Baik sebanyak 30 orang responden atau 30,64% dari 99 responden. Hasil wawancara penulis dengan sampel mengatakan dari segi pengangkatan birokrat sudah baik. Yang mana sebelum ditugaskan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) diberikan pembekalan terlebih dahulu pada masing-masing wilayah. Sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum mereka ditugaskan. Akan tetapi dari segi insentif masih buruk dikarenakan belum adanya insentif yang diberikan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga dan Tenaga Harian Lepas.
4. Keadaan struktur birokrasi dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Kecamatan Tampan mendapati jawaban Cukup Baik sebanyak 39 orang responden atau 39,14% dari 99 responden. Hasil wawancara penulis dengan sampel mengatakan pelaksana kebijakan sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Akan tetapi Koordinasi yang terjalin hanya antara Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga dan Tenaga Harian Lepas dan koordinator wilayah tidak adanya koordinasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dari rekapitulasi kuesioner tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Tampan menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan di Kecamatan Tampan ini dalam kategori yang **“Cukup Baik/ Cukup Maksimal”**, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah **60,07%**.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bisa menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) dan Tenaga Harian Lepas (THL) dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi persampahan/ kebersihan.
2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/ kebersihan.
3. Diharapkan adanya penegasan sanksi bagi wajib retribusi persampahan/ kebersihan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan.